

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 Pasal 1 menyatakan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi kementerian pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi tahun 2024 yang selanjutnya disebut Road Map merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi yang merupakan penjabaran dari Road Map Reformasi birokrasi tahun 2020-2024¹.

Permasalahan yang mempengaruhi kualitas suatu perangkat organisasi. Dikantor bupati pesisir selatan yang mana di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dinamakan adalah sekretariat daerah. Terdapat 2 faktor terjadi permasalahannya dilihat cara kerja aparatur sipil Negara dikantor bupati tersebut adalah Kuantitas, Kualitas dan kapasitas aparat belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat, Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi, Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada

¹ Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 18 tahun 2021, pasal 1 tentang road map reformasi birokrasi kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi tahun 2020-2024, hal. 3.

peningkatan kinerja, Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam praktiknya reformasi birokrasi di lingkungan kabupaten pesisir selatan masih ada kecenderungan konsentrasi penataan tata laksana hanya pada wilayah unit kerja masing-masing di suatu lembaga di kabupaten pesisir selatan. Hubungan antar unit kerja telah terdeskripsi secara jelas. Namun hanya berlaku pada ruang lingkup unit kerja yang terbatas dan dalam praktiknya masih ada pengalaman hambatan struktural karena terbentur wilayah kewenangan yang terkotak-kotak untuk berkoordinasi dan pengambilan keputusan untuk suatu tahap pelaksanaan kerja tertentu.

Terkait dengan tugas pemerintahan, dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Kondisi sebelumnya, kelembagaan pemerinthan tidak dapat berfungsi dengan baik, sudah menjadi santapan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk di cerca dan dijadikan kambing hitam segala permasalahan berkaitan dengan birokrasi. Ditambah lagi dengan kondisi para pegawai pemerintahan yang kebanyakan kurang menghargai kedisiplinan, seperti keluyuran pada jam kantor, tidak pernah datang tepat waktu, dan birokrasi yang panjang, membuat sulit bagi masyarakat untuk tergantung terhadap lembaga pemerintahan serta pegawai didalam lembaga tersebut pada saat mereka membutuhkan.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (*Organisasi*), ketatalaksanaan (*Business Process*) dan sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.²

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah sesuai dengan arahan reformasi birokrasi dimana memfokuskan upaya-upaya peningkatan kinerja reformasi birokrasi pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik terutama yang harus diperbaiki oleh pemerintah yaitu Aparatur Sipil Negara yang dimana setiap permasalahan selalu berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara atau birokrasi yang tidak bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintahan.

Aparatur sipil Negara salah satu yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik sehingga puncak dari pemerintahan yang baik itu tergantung dari aparatur sipil Negara yang bersangkutan dengan instansi yang berhubungan dengan pemerintahan. Dalam melakukan pekerjaan

² Bambang Rudito, Dkk, 2016, Aparatur sipil Negara pendukung reformasi birokrasi, Jakarta, kencana, hal. 52.

aparatur sipil Negara ditentukan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

Reformasi birokrasi merupakan upaya awal pemerintahan dalam melakukan perubahan dalam menuju pemerintahan yang lebih baik. Mulai dari pelaksanaan, penataan ulang, dan penempatan aparatur sesuai dengan kemampuan aparatur sipil Negara sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pengembangan kinerja aparatur sipil Negara.

Reformasi yang dilakukan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisma (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahterah, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Inti perubahan dari reformasi birokrasi perubahan mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada sistem yang melingkup aparatur.

Peran aparatur dalam reformasi birokrasi dalam pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya kantor Bupati dengan melakukan perubahan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati.

Pada hakikatnya dalam suatu peran pemerintahan untuk meningkatkan kinerja aparatur dilakukan berbagai macam pekerjaan. Kinerja aparatur dilihat dari hasil yang dikerjakan oleh aparatur.

Terdapat permasalahan yang terjadi dikantor bupati pesisir selatan atau disekretariat daerah itu mengenai aparatur sipil negaranya, Hubungan judul dengan jurusan adalah ada mata kuliah yang diajarkan yaitu birokrasi dan good governansi Publik. Jadi penulis mengambil judul reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara di kantor bupati kabupaten pesisir selatan. Birokrasi menurut weber birokrasi mengidentifikasikan beberapa karakteristik dari sebuah birokrasi yang menurutnya ideal yang secara professional dan rasional dijalankan.³ Untuk good governance menurut bevir berpendapat bahwa governance mengacu pada semua proses pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah, pasar atau jaringan.⁴

Dengan demikian, penulis tertarik tentang Reformasi Birokrasi di kabupaten pesisir selatan, sehingga mengambil judul “**Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi Di Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Reformasi Birokrasi Dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi di Kantor Bupati Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana Kendala Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi di Kantor Bupati Pesisir Selatan ?

³ Amy Y.S Rahayu, Dkk, 2019, birokrasi & Governance teori, konsep, dan aplikasinya, Depok , Rajawali Pers, hal. 4

⁴ Ibid, hal. 63

3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Yang Terjadi Pada Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi Di Kantor Bupati Pesisir Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi Di Kantor Bupati Pesisir Selatan.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi Di Kantor Bupati Pesisir Selatan.
3. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Kendala Yang terjaudi Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Organisasi Di Kantor Bupati Pesisir Selatan.

1.4 Mamfaat Penelitian

1. Mamfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait akan pengembangan pengetahuan ilmu administrasi Negara terutama yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara di kantor bupati pesisir selatan.

2. Mamfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan

kinerja apatur sipil Negara umumnya di kabupaten pesisir selatan.

- 2) Bagi Masyarakat, Peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap sistem pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan yang mulai membaik.
- 3) Bagi Mahasiswa, Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pembelajaran serta menambah pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan baik peneliti dan bagi mahasiswa lainnya terutama dibidang Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Ekasakti Padang.
- 4) Bagi Instansi Terkait, Sebagai bahan masukan yang bermamfat bagi Bupati Pesisir Selatan.
- 5) Bagi Universitas Ekasakti Padang, Sebagai pedoman untuk menambah literatur ilmiah terkait pada Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Dikantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. **Briyam Ksatria Pernama** dengan judul *“Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatuur Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”* jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA), Vol.7, No. 1, 2019.

Latar belakang penelitian ini adalah menganalisis penerapan reformasi birokrasi pada dinas koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian kabupaten pesisir selatan perubahan penataan melalui reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten pesisir selatan, dengan melakukan perubahan seperti penataan organisasi.

Reformasi birokrasi di dinas koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian kabupaten pesisir selatan bertujuan untuk menjadikan organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan fungsi, perbaikan ketatalaksanaan organisasi, meningkatkan sumber daya manusia dinas koperasi UMKM, perdagangan dan perindustrian melalui program pemerintah kabupaten pesisir selatan telah melakukan *Follow up* terhadap amanat reformasi birokrasi dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif penuh dengan deskriptif pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah dengan melihat langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpercaya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi telah meningkatkan kinerja aparatur dinas koperasi, UMKM,

perdagangan dan perindustrian kabupaten pesisir selatan. Namun penerapan reformasi birokrasi menimbulkan perubahan sehingga membutuhkan penyesuaian. Untuk itu, dilakukan sosialisasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi, pemberian *hardcopy* SOP baru mengawaskan melekat terhadap aparatur.⁵

2. **Telly Muriany, Victorn S. Ruhenlela** dengan judul “*Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar* “. Jurnal Aplikasi kebijakan publik & bisnis, Vol. 2, No.1, 2021.

Latar belakang penelitian ini adalah fenomena kesenjangan pelayanan publik yang belum mampu diselesaikan pemerintahan kecamatan kepulauan tanimbar (KKT) adalah pelayanan publik tingkat kecamatan yang disebabkan oleh rendahnya tata kelola pemerintahan (*government*), kedudukan, kewenangan dan kapasitas struktur organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kecamatan. Tujuan dilakukan reformasi birokrasi yaitu melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik yang ada di kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan karakteristik fenomena yang di teliti memveritivikasi isu-isu reformasi yang telah dilakukan dengan

⁵ Briyam ksatria pernama, 2019, reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja aparatur pada dinas koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat, jurnal manajemen sumber daya aparatur (MSDM), Vol.7, No.1, hal.42.

karakter yang diharapkan. Metode ini menggunakan teknik wawancara, observasi, perpustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan kecamatan tanimbar selatan (KKT) tidak efektif karena masalah yang dihadapi terkait dengan upaya pemerintah kecamatan untuk melaksanakannya reformasi birokrasi kewenangan diberikan belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang diharapkan. Aspek organisasi struktur, telah menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengutamakan aspek kepentingan dan kebutuhan serta ketersediaan APBD, fungsi kewenangan seringkali tidak disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi aparatur. Itu didasarkan pada suka atau tidak suka, informasi berbasis teknologi masih kurang diantaranya tentu saja hal ini berdampak negatif pada rendahnya tingkat masyarakat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat tidak puas dan tidak percaya pada layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.⁶

⁶ Telly Muriany, Victorn S. Ruhenlela, 2021, reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dikecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar, jurnal aplikasi kebijakan publik & bisnis, Vol. 2, No.1, hal. 1

1.6 Matriks Review Penelitian Yang Relevan

Tabel 1

NO	Peneliti	Judul	Hasil Peneitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Briyam Ksatria Pernama	Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pada DinasKoperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.	Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Reformasi Birokrasi Telah Meningkatkan Kinerja Aparatur DinasKoperasi UMKM,Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Namun penerapan reformasi birokrasi menimbulkan perubahan yang cukup mendasar sehingga membutuhkan penyesuain. Untuk itu dilakan sosialisasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi, pemberi hardcopy SOP yang baru dan pengawasan melekat terhadap aparatur.	- Penelitian sama-sama membahas tentang reformasi birokrasi mengenai kinerja -Sama-sama menggunakan metode kualitatiif -Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi -Sama-sama bertempat di kabupaten pesisir selatan.	- Tempat instansi yang akan diteliti beda yaitu kantor Bupati Pesisir Selatan. - Dalam penelitian ini yang dibahas tentang penataan organisasi, peningkatan sumber daya manusia aparatur dan penataan ketatalaksanaan. Yang akan diteliti menggunakan konsep pelayanan prima aparatur sipil Negara di kantor

					kabupaten pesisir selatan.
2.	Telly Muriany, Victorn S Ruhenla	Reformasi birokrasi dalam pelayanan di kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepualaun tanimbar.	Hasil penelitian ini menunjukkan kecamatan tanimbar selatan (KKT) tidak efektif karena masalah yang dihadapi terkait dengan upaya pemerintah kecamatan untuk melaksanakannya reformasi birokrasi kewenangan diberikan belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang diharapkan. Aspek organisasi struktur, telah menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengutamakan aspek kepentingan dan kebutuhan serta ketersediaan APBD, fungsi kewenangan seringkali tidak disesuaikan dengan kapasitas	-Sama-sama membahas reformasi birokrasi -Sama-sama menggunakan metode kualitatif -Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi	-Pembahasannya berbeda penelitian ini membahas pelayanan publik yang akan diteliti meningkatkan kinerja aparatur sipil. -Lokasi penelitian berbeda yaitu : kabupaten pesisir selatan

			dan kompetensi aparatur. Itu didasarkan pada suka atau tidak suka, informasi berbasis teknologi masih kurang diantaranya tentu saja hal itu berdampak negatif pada rendahnya tingkat masyarakat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat tidak puas dan tidak percaya pada layanan publik yang disediakan oleh pemerintah		
--	--	--	---	--	--

